



Literature Riview: Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian Terhadap Efisiensi Penganggaran Biaya SDM di Instansi Pemerintah

Lailatul Rushaj ^{1*}, dan Fajar Syaiful Akbar ²

¹ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Rungkut Menanggal, Surabaya, Jawa Timur; e-mail : lailatulrushaj17@gmail.com

² Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Rungkut Menanggal, Surabaya, Jawa Timur; e-mail : fajarsa.ak@upnjatim.ac.id

* Corresponding Author : Lailatul Rushaj

Abstract: This study aims to analyze the impact of integrating the Human Resource Information System (HRIS) on the efficiency of human resource (HR) budgeting in government institutions and regional owned enterprises (BUMD). Using a Systematic Literature Review (SLR) approach. This research synthesizes findings from six nationally accredited journals (2018-2024), complemented by practical observations during an internship at Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. This results reveal that HRIS implementation significantly reduces operational cost up to 90% and enhances the accuracy of employee data such as attendance, overtime, and allowances. Furthermore, the system accelerates financial reporting, strengthens transparency, and support real time decision making. The study concludes the HRIS integration plays a strategic role in improving budgeting efficiency and accountability in public sector financial management. Practically, this research emphasizes the importance of HR digitalization in supporting effective and transparent HR budgeting.

Keywords: HRIS; budget efficiency; HR budgeting

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh integrasi Human Resource Information System (HRIS) terhadap efisiensi penganggaran biaya sumber daya manusia (SDM) pada instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendekatan yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap enam jurnal nasional terakreditasi (2018–2024) yang didukung oleh hasil observasi magang di Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan HRIS mampu menurunkan biaya operasional hingga 90%, meningkatkan akurasi data kepegawaian seperti absensi, lembur, dan tunjangan, serta mempercepat proses pelaporan keuangan secara real-time dan terverifikasi. Sistem ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran SDM. Dengan demikian, integrasi HRIS berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya digitalisasi administrasi kepegawaian untuk mendukung efektivitas dan transparansi penganggaran SDM.

Kata kunci: HRIS; efisiensi anggaran; penganggaran SDM

Received: 7 Juli 2025

Revised: 27 September 2025

Accepted: 14 November 2025

Published: 18 November 2025

Curr. Ver.: 18 November 2025



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah, belanja sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu komponen terbesar yang memerlukan pengawasan ketat. Proses administrasi kepegawaian yang masih dilakukan secara manual sering kali menimbulkan inefisiensi, seperti duplikasi pekerjaan, keterlambatan pelaporan, dan kesalahan pencatatan. Kondisi ini

menyebabkan data kepegawaian yang digunakan dalam perencanaan dan pelaporan keuangan menjadi kurang akurat. Keterlambatan dalam rekapitulasi lembur dan tunjangan pegawai juga menghambat proses penyusunan laporan anggaran. Akibatnya, efektivitas penggunaan anggaran pegawai sulit dicapai secara optimal. Situasi ini menunjukkan pentingnya inovasi sistem informasi dalam mendukung efisiensi pengelolaan keuangan berbasis SDM.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, berbagai instansi pemerintah mulai menerapkan *Human Resource Information System* (HRIS) atau Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Sistem ini memfasilitasi digitalisasi proses administrasi kepegawaian secara menyeluruh, mulai dari absensi, pengajuan cuti, lembur, hingga penghitungan tunjangan pegawai [1]. HRIS mampu menurunkan biaya operasional administrasi hingga 90% sekaligus meningkatkan akurasi data pegawai. Selain efisiensi biaya, HRIS juga mendorong transparansi dan mempercepat pelaporan keuangan berbasis data real-time [2], menegaskan bahwa keandalan laporan keuangan publik sangat bergantung pada integrasi sistem informasi dengan data kepegawaian yang dikelola secara akurat dan terverifikasi.

HRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pengendalian internal dan perencanaan anggaran. Sistem digital memungkinkan proses birokrasi menjadi lebih cepat, terukur, dan minim potensi manipulasi data [3]. Selain itu, [4] menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem informasi SDM yang terintegrasi dapat memperbaiki keandalan pelaporan serta mendukung proses perencanaan anggaran berbasis aktivitas pegawai. Implementasi HRIS juga memperkuat prinsip akuntabilitas publik melalui dokumentasi otomatis yang mudah dilacak dan diaudit. Dengan demikian, digitalisasi kepegawaian bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat tata kelola dan transparansi keuangan sektor publik.

Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menitikberatkan pembahasan pada pengaruh HRIS terhadap kualitas laporan keuangan, bukan terhadap efisiensi penganggaran biaya SDM, khususnya di instansi pemerintah daerah dan BUMD. Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini menunjukkan perlunya analisis yang menyoroti hubungan langsung antara integrasi HRIS dan efisiensi pengelolaan anggaran SDM di sektor publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menelaah secara sistematis literatur terkait integrasi HRIS terhadap efisiensi penganggaran biaya SDM, dengan dukungan observasi empiris selama magang di Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap penguatan sistem informasi akuntansi sektor publik serta menawarkan rekomendasi praktis bagi peningkatan efisiensi dan akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan SDM pemerintah daerah.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

2.1. Human Resource Information System (HRIS) dalam Administrasi Kepegawaian

Human Resource Information System (HRIS) atau Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengelola data dan proses administrasi pegawai secara terintegrasi. Sistem ini mencakup berbagai fitur, mulai dari pencatatan absensi, pengajuan cuti dan lembur, hingga rekapitulasi tunjangan dan pensiun. Tujuan utama HRIS adalah menciptakan efisiensi operasional, akurasi data, dan peningkatan layanan kepegawaian dalam suatu organisasi.

Dalam konteks organisasi sektor publik, keberadaan HRIS semakin penting karena tuntutan efisiensi anggaran dan transparansi birokrasi [1], implementasi HRIS dapat menurunkan biaya operasional administrasi SDM hingga 90%, serta menyediakan akses real-time terhadap data pegawai. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan strategis berbasis data aktual dan mempercepat proses pelaporan keuangan SDM.

Dukungan dari literatur lain memperkuat peran HRIS sebagai komponen sistem informasi manajerial dan akuntansi [5]. Menyebutkan bahwa sistem informasi yang terintegrasi

mampu meningkatkan koordinasi antar unit organisasi, terutama dalam pengelolaan kepegawaian dan pembiayaan. Oleh karena itu, HRIS tidak hanya berperan administratif, tetapi juga strategis dalam pengelolaan organisasi publik modern.

2.2 Efisiensi Penganggaran Biaya SDM

Efisiensi dalam penganggaran biaya SDM mengacu pada kemampuan instansi dalam mengalokasikan dan mengendalikan beban keuangan pegawai secara optimal. Komponen biaya tersebut meliputi gaji, tunjangan, lembur, dan pensiun. Dalam lingkungan birokrasi, proses ini kerap menemui tantangan akibat data yang tidak akurat dan dokumentasi manual yang rentan kesalahan.

[6] Menekankan pentingnya kualitas data kepegawaian dalam perencanaan dan pengendalian anggaran SDM. Semakin baik dokumentasi dan akurasi data pegawai, semakin besar peluang organisasi mencapai efisiensi keuangan. Hal ini didukung oleh [7] yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran harus berbasis pada kebutuhan nyata dan perencanaan kerja yang terdokumentasi.

Implementasi HRIS membantu proses penganggaran karena seluruh data seperti absensi, lembur, mutasi, dan beban kerja tersedia secara digital dan terintegrasi dengan sistem keuangan. Ini memungkinkan penyusunan anggaran yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data aktual. Dengan demikian, HRIS menjadi solusi nyata dalam mewujudkan efisiensi pengelolaan biaya SDM.

2.3 Akuntabilitas dan Kualitas Laporan Keuangan SDM

Dalam sektor publik, akuntabilitas laporan keuangan merupakan indikator penting dari transparansi dan tata kelola keuangan yang baik. Pelaporan yang berkualitas memerlukan data kepegawaian yang sah, terverifikasi, dan siap diaudit. Oleh karena itu, sistem informasi kepegawaian memainkan peran penting dalam mendukung akuntabilitas ini.

[2] menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh sistem informasi yang digunakan dan keakuratan data yang tersedia. Laporan yang andal hanya dapat disusun apabila informasi terkait beban pegawai, tunjangan, dan lembur dicatat dengan benar dan terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, laporan yang konsisten memudahkan proses audit internal maupun eksternal.

[8] Menambahkan bahwa HRIS dapat meningkatkan keandalan pelaporan karena mampu menghasilkan informasi yang lengkap, terstruktur, dan diperbarui secara berkala. Ini menjadikan HRIS sebagai pilar utama dalam pencapaian transparansi keuangan, khususnya dalam laporan SDM yang sering menjadi objek perhatian auditor publik.

2.4 Karakteristik Laporan Keuangan yang Berkualitas

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat kriteria utama: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Keempat elemen ini menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas sistem informasi yang digunakan oleh organisasi publik, termasuk dalam konteks pelaporan SDM.

Menurut [4], laporan keuangan dianggap relevan apabila memengaruhi pengambilan keputusan; andal jika bebas dari kesalahan material dan bias; mudah dipahami jika disusun secara sistematis; dan dapat dibandingkan jika konsisten antar periode. Sistem informasi berbasis HRIS mampu mendukung keempat kriteria tersebut karena seluruh data terekam secara otomatis dan real-time.

Dengan struktur data yang rapi dan pembaruan berkala, HRIS mempermudah proses verifikasi dan validasi laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan pun menjadi lebih transparan, efisien, serta mudah ditelusuri. Hal ini penting dalam konteks penggunaan dana publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara akurat dan profesional.

2.5 Perspektif Teoritis: Teori Sistem dan Teori Agensi

Teori Sistem memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi dan berfungsi secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, Human Resource Information System (HRIS) atau Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan salah satu subsistem informasi yang berperan penting dalam mendukung sistem manajerial dan keuangan organisasi. Integrasi HRIS dengan sistem keuangan memungkinkan arus data kepegawaian seperti absensi, lembur, dan tunjangan mengalir secara otomatis dan real-time, sehingga mempercepat proses penyusunan laporan serta mengurangi duplikasi pekerjaan administratif. Dengan demikian, berdasarkan Teori Sistem, penerapan HRIS dapat meningkatkan efisiensi penganggaran biaya SDM melalui keterpaduan informasi antarbagian dan pengurangan aktivitas manual yang tidak produktif.

Selain itu, Teori Agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal (pimpinan atau pemberi mandat) dan agen (pegawai atau pelaksana kebijakan) yang memerlukan transparansi serta pelaporan yang akurat untuk menghindari konflik kepentingan. Dalam kerangka ini, HRIS berperan sebagai mekanisme pengendalian informasi antara prinsipal dan agen melalui penyediaan data kepegawaian yang akurat, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Penerapan HRIS mampu menekan risiko moral hazard seperti manipulasi data lembur atau klaim tunjangan tidak sah karena seluruh transaksi kepegawaian tercatat secara digital dan dapat diverifikasi. Oleh karena itu, berdasarkan Teori Agensi, HRIS berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi penganggaran SDM melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan pelaporan biaya pegawai.

Kedua teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian ini. Teori Sistem menekankan pentingnya integrasi dan sinergi antar subsistem organisasi agar proses keuangan berjalan efisien, sedangkan Teori Agensi menyoroti pentingnya transparansi dan pelaporan yang andal untuk mengendalikan perilaku agen agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran. Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi HRIS tidak hanya berfungsi secara teknis untuk otomatisasi data kepegawaian, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi penganggaran dan memperkuat tata kelola keuangan sektor publik secara keseluruhan.

3. Metode yang Diusulkan

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yaitu pendekatan terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis literatur yang relevan dengan suatu topik penelitian tertentu. Kajian literatur sistematis dianggap efektif dalam merangkum pengetahuan dari berbagai studi dan menyediakan dasar teoritis yang kuat untuk analisis mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Dalam konteks ini, fokus kajian diarahkan pada integrasi sistem informasi kepegawaian (HRIS/SIMPEG) terhadap efisiensi penganggaran biaya sumber daya manusia (SDM) di sektor publik.

Menurut [2], metode kajian literatur sangat penting untuk menyusun analisis berbasis data dan mendukung kualitas pelaporan keuangan instansi melalui evaluasi terhadap kinerja sistem informasi kepegawaian. Kajian literatur memberikan kerangka teoritis yang sistematis untuk mengkaji sejauh mana teknologi informasi dapat memperkuat akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaporan SDM, terutama dalam konteks pemerintahan dan BUMD yang memiliki beban belanja pegawai yang besar dan kompleks.

Dalam [8], dijelaskan bahwa kegiatan studi berbasis literatur merupakan tahap awal dalam menilai kelayakan sistem dan sumber daya yang digunakan, khususnya dalam aspek manajemen SDM dan pengambilan keputusan yang efisien. Senada dengan itu [5], juga menegaskan bahwa integrasi data dan proses berbasis sistem informasi memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi karena mampu mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan strategis berbasis data SDM.

3.1. Tahapan Kajian Literatur

a. Perumusan Pertanyaan Penelitian;

Pertanyaan utama dalam kajian ini adalah: Bagaimana sistem informasi kepegawaian berdampak pada efisiensi penganggaran SDM di instansi pemerintah dan BUMD?

b. Strategi Pencarian Literature;

Pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti HRIS, SIMPEG, penganggaran SDM, efisiensi biaya pegawai, dan akuntabilitas laporan kepegawaian. Artikel dicari dari jurnal nasional terakreditasi dengan periode terbit tahun 2018–2024.

c. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi: artikel yang membahas instansi pemerintah/BUMD; mengangkat isu pengelolaan SDM berbasis sistem informasi; memiliki variabel efisiensi atau kualitas pelaporan. Kriteria eksklusi: artikel dari sektor swasta; tidak relevan dengan akuntansi sektor publik; tidak memiliki metodologi terstruktur.

d. Pengelompokan dan Analisis Literature

Artikel yang memenuhi kriteria diklasifikasikan berdasarkan tahun terbit, metode penelitian, objek studi, dan fokus variabel. Analisis dilakukan secara naratif dan tematik, dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan antar studi, kekuatan metodologis, serta research gap yang belum banyak dikaji. Validitas hasil kajian dijaga melalui proses triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai jurnal yang memiliki topik serupa untuk memastikan konsistensi hasil, sedangkan reliabilitas diperkuat dengan hanya menggunakan literatur dari jurnal nasional terakreditasi yang telah melalui proses peninjauan sejawat (peer-reviewed).

3.2. Format Komponen Matematika

Sebanyak enam artikel jurnal nasional yang memenuhi kriteria inklusi dipilih sebagai sumber utama dalam kajian ini. Seluruh artikel membahas topik-topik yang berkaitan langsung dengan integrasi sistem informasi kepegawaian terhadap efisiensi anggaran, pelaporan SDM, atau sistem akuntansi sektor publik. Berikut ini adalah ringkasan jurnal yang dianalisis:

Tabel 1 Artikel Terkait

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	H. N. Fatinah	HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM : Fungsi, Peran, Manfaat, dan Penerapan Pada Wordpress	HRIS dapat menurunkan beban biaya hingga 90% dalam operasional kepegawaian. Sistem ini juga meningkatkan kecepatan akses data, akurasi pencatatan pegawai, dan efisiensi pelaporan karena pengelolaan dilakukan secara digital dan terpusat.
2.	R. P. Mahfuz dan Z. Hanum	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal)	Ditemukan bahwa sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan data SDM secara signifikan meningkatkan kualitas laporan, terutama dalam hal keandalan dan akuntabilitas data beban pegawai, lembur, dan tunjangan.
3.	Jakarwi dan R. Mut-taqin	Akuntabilitas Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan E-Dokumen	Sistem e-dokumen mempermudah pencatatan dan pelacakan data pegawai, serta mempercepat proses pelaporan karena arsip terdigitalisasi dan dapat ditelusuri. Hal ini berkontribusi besar terhadap efisiensi birokrasi dan keandalan informasi kepegawaian.
4.	N. K. D. Lestari, N. P. A. Kusumawati dan I. P. Nurutama	Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Memoderasi Hubungan	Hasil menunjukkan bahwa teknologi seperti HRIS hanya efektif jika dioperasikan oleh SDM yang kompeten.

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
		Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD Se-Kecamatan Penebel	Tanpa kompetensi yang memadai, sistem kepegawaian tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaporan.
5.	U. H. Mufahharoh, M. Amin dan Afifudin	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemeintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Luamajang (Studi Kasus pada Kantor BPKD Kabupaten Lumajang)	Kompetensi pegawai memengaruhi efisiensi dalam pencatatan beban kepegawaian dan ketepatan waktu penyusunan laporan. Penelitian merekomendasikan pemanfaatan system informasi SDM untuk meningkatkan kualitas pelaporan berbasis aktivitas pegawai.
6.	Marlena, R. Murnisari dan N. L. Purbaningrum	Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas Kinerja Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung	Realisasi anggaran dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan dan pelaksanaan belanja termasuk belanja pegawai. Ketidakefisienan biasanya terjadi karena data SDM yang tidak valid atau perencanaan tunjangan yang tidak tepat.

3.3. Konteks Praktis (Observasi Magang)

Selain melalui kajian literatur, penelitian ini juga didukung oleh observasi langsung yang dilakukan oleh penulis selama mengikuti kegiatan magang di Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Observasi ini memberikan pemahaman praktis mengenai implementasi HRIS/SIMPEG, terutama dalam pengelolaan administrasi kepegawaian seperti cuti tahunan, lembur pegawai, dan perhitungan tunjangan. Seluruh proses tersebut dicatat secara digital dan berperan langsung dalam mendukung penyusunan laporan bulanan maupun perencanaan anggaran SDM.

Melalui kegiatan magang tersebut, penulis dapat mengamati bahwa sistem informasi kepegawaian yang diterapkan telah terintegrasi dengan sistem pelaporan internal dan mendukung efisiensi proses administratif secara nyata. Data kepegawaian yang terdigitalisasi mempercepat penyusunan laporan keuangan pegawai dan mempermudah proses rekap beban kerja, khususnya dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga telah diadopsi dalam praktik pemerintahan lokal.

Dengan pendekatan tersebut, artikel ini tidak hanya merekonstruksi teori melalui literatur yang tersedia, tetapi juga merefleksikan praktik nyata di lapangan. Penggabungan antara kajian konseptual dan pengalaman empiris ini memperkuat validitas temuan dan memperkaya pembahasan dari sisi teoritis maupun aplikatif, terutama dalam memahami kontribusi HRIS terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di sektor publik.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian dari enam jurnal ilmiah yang telah direview, ditemukan bahwa sistem informasi kepegawaian seperti HRIS dan SIMPEG memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi pencatatan SDM, kualitas pelaporan keuangan, serta efektivitas penganggaran biaya SDM di instansi pemerintah. [1], menyatakan bahwa HRIS mampu menurunkan beban biaya operasional kepegawaian hingga 90% melalui otomatisasi proses pencatatan cuti, lembur, dan kehadiran pegawai. Dengan sistem informasi, data kepegawaian dapat dikelola secara terpusat dan real-time, sehingga mendukung kecepatan pelaporan dan akurasi rekap tunjangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian [4] yang menjelaskan bahwa

integrasi HRIS di lingkungan pemerintah daerah mampu mempercepat proses penyusunan anggaran melalui sinkronisasi data kehadiran dan penggajian. Kesamaan hasil tersebut memperkuat bukti empiris bahwa HRIS efektif dalam meningkatkan efisiensi anggaran pegawai pada organisasi publik.

Hal serupa dikemukakan oleh [3], yang menjelaskan bahwa digitalisasi dokumen melalui sistem e-dokumen mampu mempercepat birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mempermudah pelacakan data kepegawaian. Hal ini sangat relevan dalam mendukung pelaporan anggaran berbasis SDM. [2], menambahkan bahwa integrasi sistem informasi akuntansi dengan data kepegawaian berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, terutama dalam penyajian akun-akun seperti gaji, tunjangan, dan lembur. Pelaporan menjadi lebih transparan karena berdasarkan data aktual pegawai yang terekam otomatis dalam sistem. Temuan tersebut sejalan dengan studi [1], yang menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi informasi berbasis SDM dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan publik. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menekankan pengaruh langsung HRIS terhadap efisiensi penganggaran, bukan hanya kualitas pelaporan.

Temuan ini juga didukung oleh [9]. Yang menegaskan bahwa kompetensi pegawai dalam mengelola sistem informasi menjadi faktor penting yang memengaruhi akurasi penyusunan anggaran beban pegawai. Penggunaan HRIS memungkinkan penyusunan anggaran berbasis data nyata, seperti lembur aktual, frekuensi cuti, dan tunjangan tetap, yang semuanya tercatat otomatis dan dapat dievaluasi secara berkala. Hasil tersebut memperkuat studi [10]. yang menyatakan bahwa ketidakefisienan anggaran sering kali disebabkan oleh data pegawai yang tidak mutakhir dan perencanaan tunjangan yang tidak berbasis data aktual. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pembaruan empiris bahwa penerapan HRIS berperan langsung dalam memperbaiki perencanaan dan realisasi anggaran SDM.

Dari sisi metode, sebagian besar jurnal yang dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif seperti regresi linier dan uji korelasi, sementara lainnya menggunakan metode studi kasus dan deskriptif kualitatif. Objek kajiannya pun beragam, mulai dari dinas daerah, kementerian, hingga sistem keuangan pemerintahan secara umum. Meski beragam, semuanya menekankan bahwa sistem informasi mendorong efisiensi proses pengelolaan SDM dan memperkuat akuntabilitas pelaporan. Perbandingan lintas penelitian ini menunjukkan konsistensi bahwa HRIS berkontribusi pada efisiensi anggaran tidak hanya di tingkat operasional, tetapi juga strategis melalui integrasi data antarunit.

Temuan-temuan ini diperkuat oleh praktik langsung penulis selama menjalani magang di Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Di instansi tersebut, sistem informasi kepegawaian digunakan untuk mencatat cuti tahunan, lembur pegawai, dan data pensiun. Semua data tersebut direkap secara digital dan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan bulanan serta rekapitulasi beban pegawai yang akan masuk dalam rencana anggaran. Pengalaman praktis ini konsisten dengan hasil penelitian [2], yang menyatakan bahwa integrasi sistem informasi SDM dapat meningkatkan akurasi pelaporan keuangan dan efektivitas penganggaran. Hal ini menegaskan bahwa hasil penelitian tidak hanya valid secara teoritis, tetapi juga terbukti secara empiris di lapangan.

Oleh karena itu, pembahasan ini secara langsung berkaitan dengan kompetensi dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan Penganggaran, karena menyentuh aspek pengelolaan belanja pegawai dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta penguatan sistem informasi sebagai bagian dari Sistem Informasi Akuntansi di instansi pemerintah dan BUMD.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi sistem informasi kepegawaian, seperti Human Resource Information System (HRIS) atau SIMPEG, memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi penganggaran biaya SDM di instansi pemerintah dan BUMD. Implementasi HRIS memungkinkan pengelolaan data kepegawaian secara terpusat, akurat,

dan real-time, yang berdampak langsung pada ketepatan penyusunan laporan serta pengendalian beban keuangan pegawai. Dengan adanya digitalisasi ini, proses administratif menjadi lebih cepat, transparan, dan bebas dari duplikasi data, sehingga mendorong efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa HRIS juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan dan efektivitas pengawasan internal. Data kepegawaian yang terdokumentasi secara otomatis mendukung keterpaduan antara sistem informasi SDM dan sistem akuntansi, sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi ini tidak hanya menurunkan potensi kesalahan administratif, tetapi juga memperkuat keandalan informasi bagi pengambilan keputusan strategis di tingkat manajerial.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat penelitian terdahulu yang menegaskan hubungan positif antara digitalisasi administrasi publik dan efisiensi penganggaran. Namun, penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dengan menekankan relevansi penerapan HRIS dalam konteks BUMD, yang sebelumnya masih jarang dikaji secara mendalam. Dengan demikian, integrasi sistem informasi kepegawaian tidak hanya relevan bagi peningkatan kinerja administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengendalian biaya operasional dan tata kelola keuangan yang akuntabel di sektor publik.

Saran

Secara praktis, instansi pemerintah dan BUMD disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan HRIS tidak hanya pada fungsi administrasi dasar seperti absensi dan cuti, tetapi juga dalam perencanaan strategis SDM, penganggaran, serta evaluasi kinerja. Penggunaan HRIS yang lebih luas akan mendorong efisiensi kerja lintas bagian dan memperkuat koordinasi antarunit dalam pengelolaan kepegawaian. Selain itu, pelatihan rutin bagi pegawai dalam penggunaan sistem informasi menjadi langkah penting untuk menjaga akurasi dan konsistensi data, sehingga kualitas informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial secara tepat.

Dari sisi teoretis, penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan mengintegrasikan variabel lain seperti kompetensi digital pegawai, kesiapan organisasi terhadap transformasi digital, atau hubungan HRIS dengan akuntabilitas kinerja. Pengembangan model penelitian dengan pendekatan kuantitatif, seperti pengujian regresi atau Structural Equation Modeling (SEM), juga direkomendasikan untuk memperkuat bukti empiris dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antar variabel. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih luas dan relevan terhadap pengembangan teori manajemen SDM berbasis sistem informasi di sektor publik.

Daftar Pustaka

- [1] H. N. Fatinah, "HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM : Fungsi, Peran, Manfaat, dan Penerapan Pada Wordpress," *Applied Business and Administration Journal*, vol. Vol. 1 No. 2, pp. 66-73, 2022.
- [2] R. P. Mahfuz and Z. Hanum, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal)," *Riset & Jurnal Akuntansi*, vol. Vol. 7 No. 4, pp. 2895-2904, 2023.
- [3] Jakarwi and R. Muttaqin, "Akuntabilitas Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan E-Dokumen," *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, vol. Vol. 3 No. 2, pp. 264-271, 2018.
- [4] N. K. D. Lestari, N. P. A. Kusumawati and I. P. Nurutama, "Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Memoderasi Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD Kecamatan Penebel," *Hita Akuntansi dan Keuangan*, vol. Vol. 3 No. 1, pp. 268-284, 2022.

-
- [5] I. Ilyas, C. Marlinda, H. Herman, Marhalinda and Satriadi, *Manajemen Strategi*, M. Suardi, Ed., Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2023.
- [6] Z. Musthan, *Konsep Manajemen Pendidikan & Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Tahta Media Group, 2024.
- [7] E. Sudarmanto, A. Fitriana, M. Malau, C. D. Nainggolan, A. Zunaidi, S. Manurung, N. N. Halisa, M. I. Syairozi, E. S. Paranita, G. Wicaksono, D. C. Pangestuti, I. Hasbi, Bambang and G. Hidayat, *Penganggaran Perusahaan*, 1 ed., Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- [8] D. E. Putri, R. Irwansyah, A. Bairizki, I. Ramadhani, G. Ganika, E. Sudarmanto, D. R. Sholihah, R. Vikaliana, G. Wicaksono, L. H. Aziz, D. G. Satriawan and N. Khoiriyah, *Studi Kelayakan Bisnis*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- [9] U. H. Mufahharoh, M. Amin and Afifudin, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Luamajang (Studi Kasus pada Kantor BPKD Kabupaten Lumajang)," *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, vol. Vol. 12 No. 2, pp. 657-670, 2023.
- [10] Marlena, R. Murnisari and N. L. Purbaningrum, "Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas Kinerja Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung," *Journal Accounting and Tax*, vol. Vol. 1 (1), pp. 45-55, 2022.